

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Bappenas. 2019. *Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019*. Jakarta. ([https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Evaluasi Perencanaan Pembangunan/Evaluasi%20Akhir%20RPJMN%202015-2019.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Evaluasi_Perencanaan_Pembangunan/Evaluasi%20Akhir%20RPJMN%202015-2019.pdf)), diakses 05 April 2023.
- Bhattacharjee, A. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*, Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulustyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hikmawati, F. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Hill, M., & Hupe, P. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Sage Publications.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Parsons, W. 2014. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Sugandi, Y. S. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama.

Wahab, S. A. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 15.

Wahab, S. A. 2014. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpressindo.

Winarno, B. 2002. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Presindo.

Yin, R. K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods Second Edition (Applied Social Research Methods Series)*. Sage Publications.

Skripsi & Jurnal:

Andhika, L. R. 2019. Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 10(1), 73 – 86.

Angelica, T. A. 2020. Kegagalan Kebijakan Publik Studi Kasus Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos di Kota Padang, Universitas Andalas: *Skripsi*.

Bovens, M., & Hart, P. 2016. Revisiting the Study of Policy Failures, *Journal of European Public Policy*, 1-14.

Baral, U. N. 2017. Research Data in Social Science Methods, *Journal of Political Science*, Vol 17, 82-104.

Heryana, A. 2018. Informan dan Pemilihan informan dalam Penelitian Kualitatif. Hlm. 4-5.

Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. 2019. Policy Failure and The Policy-Implementation Gap: Can Policy Support Programs Help?. *Policy Design and Practice*, 2(1): 1-14.

Howlett, M., Ramesh, M., & Wu, X. 2015. Understanding the persistence of policy failures: The role of politics, governance and uncertainty. *Public Policy and Administration*, 30(3-4), 209-220.

McConnell, A. 2015. What is policy failure? A primer to help navigate the maze. *Public Policy and Administration*, 30(3-4), 221-242.

Mubarok, R. M. & dkk. 2021. Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (The Failure of Mexico Government Policy to Overcome Femicide Crisis).

Murdiyana, & Mulyana. 2017. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 73-96.

Nugraha, A., & Kismartini. 2019. Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).

Tinolah, R. S. 2016. Kebijakan Publik yang Tidak terimplementasikan: Studi Kasus PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(1), 1-11.

Dokumen & Peraturan-peraturan:

_____. *Kecamatan Harau dalam Angka*

_____. *Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Nagari Sarilamak.*

_____. *Peraturan Menteri desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan pemingkatan, Pembinaan dan pengembangan, dan Pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.*

_____. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*

_____. *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*

_____. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sarilamak (RPJM Nagari) Tahun 2022-2028.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Website:

Antara Sumbar. 2015. Pemprov Sumbar Dukung Pendirian BUMDes. (<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/136625/pemprov-sumbar-dukung-pendirian-bumdes>), diakses 24 Maret 2023.

Bumdes.kemendesa.go.id, 2023. (<https://bumdes.kemendesa.go.id/>), diakses 09 Juli 2023.

BPHN. Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan, (https://bphn.go.id/data/documents/penanggulangan_kemiskinan.pdf), diakses 05 April 2023.

Kemendespdtt. 2022. (<https://www.instagram.com/kemendespdtti/?hl=id>), diakses 24 April 2023.

Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi NTT. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Mendirikan Bumdes. Tulisan Hukum, (<https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Kewenangan-Pemerintah-Desa-Dalam-Mendirikan.Pdf>), diakses 4 April 2023.

TNP2K. Modul Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. (<https://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/modul-penanggulangan-kemiskinan-ekstrem>), diakses 05 April 2023.